

Ribuan Guru Kumpul di Ibu Kota Bombana

Bombana, SultraNET. | Lebih dari seribu orang guru dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara berkumpul di Rumbia Ibu Kota Kabupaten Bombana, Kamis (10/11/2022).

Kehadiran ribuan guru itu untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) ke 77 Tahun.

Peringatan HUT PGRI dan HGN ke 77 Tahun dimeriahkan dengan Pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni PGRI tingkat Kabupaten Bombana.

Kegiatan Porseni yang mengangkat Tema Guru Bangkit, Pulihkan Pendidikan, Indonesia Kuat, Indonesia Maju dilaksanakan dari tanggal 10 hingga 17 November 2022 dan di ikuti 12 PGRI Cabang Kecamatan Se Kabupaten Bombana.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Man Arfa saat mewakili Bupati Bombana menyampaikan sambutan mengapresiasi pelaksanaan Porseni yang dilaksanakan oleh PGRI Bombana.

Ia berharap kegiatan itu dapat membawa hasil yang maksimal sekaligus dapat meningkatkan semangat solidaritas dan kebersamaan para guru.

Selain dari itu, Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bombana itu menyebut Pemerintah berharap agar para guru selalu meningkatkan kualitas dan kompetensinya.

“Kita berharap para Guru mampu menunjukkan karya nyata dengan melakukan pembentukan karakter bangsa yang lebih bermoral, bermartabat dan berdaya saing,” ujar Man Arfa

Kepada Pengurus PGRI ia berharap agar mampu merumuskan secara komprehensif upaya mencetak guru guru yang lebih peduli dalam menjalankan tugasnya secara disiplin bertanggung jawab dan lebih amanah.

Sebagai penutup mewakili Pemerintah Kabupaten Bombana ia mengucapkan

selamat dan sukses rangkaian kegiatan memeriahkan HUT PGRI dan HGN ke 77 tahun 2022.

“Kami ucapkan selamat bertanding, junjung tinggi sportifitas dan persaudaraan,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Ketua PGRI Bombana, Kandamang mengatakan kegiatan Porseni bertujuan sebagai wadah menyalurkan minat, bakat dan hobi para guru.

“Sasaran kegiatan ini adalah para guru dan tenaga kependidikan yang ada di Bombana,” ujar Kandamang.

Ia merinci kegiatan Porseni bakal mempertandingkan 8 jenis olahraga, 5 kesenian serta lomba video pembelajaran.

“Kita berharap kegiatan ini dapat mempererat silaturahmi antar guru sekaligus sebagai kontribusi nyata PGRI untuk kemajuan Daerah,” pungkasnya.

Pewarta : Idris hayang

Pasir Sungai di Desa Mambo Bombana Ditambang Ilegal

Bombana, SultraNET. | Aktivitas Penambangan Pasir secara ilegal atau tanpa mengantongi perizinan terjadi secara masif di Daerah Aliran Sungai Desa Mambo, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penambangan pasir dengan menggunakan alat berat jenis ekskavator sudah terjadi sejak tahun 2021 hingga saat ini.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mambo, Sahiruddin. Kamis (10/11/2022) mengatakan akibat aktivitas tambang pasir yang berlangsung lama, salah satu asset yaitu tanggul batu yang dibangun Dinas Penanggulangan Bencana Daerah untuk penahan air banjir menjadi roboh.

Yang lebih parah akses jalan utama Desa menjadi rusak dan berlubang akibat alat berat yang lalu lalang bebas di atas aspal.

“Karena alat berat yang dipakai menambang pasir lalu lalang, jalan beraspal menjadi rusak,” ujar Sahiruddin.



Akses Jalan Desa Mambo

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bombana terkhusus Dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Lingkungan Hidup serta Aparat Penegak Hukum Polres Bombana untuk turun dan melakukan tindakan agar kerusakan fasilitas dan lingkungan yang lebih besar akibat aktivitas tambang pasir dapat diminimalisir.

“Hancur jalanan kami, menderita kami pengguna jalan yang memakai motor, jalan berlubang dan banyak terhambur kerikil tajam di area pengolahan batu yang juga punya kaitan dengan penambangan pasir ilegal,” pungkasnya. **(IS)**.

Sekda Bombana Pimpin Upacara Hari Pahlawan

Bombana, SultraNET. | Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Man Arfa memimpin pelaksanaan upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional ke-77, bertempat di halaman Kantor Bupati Bombana, Kamis (10/11/2022).

Pada kesempatan itu, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bombana itu membacakan amanah Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini.

Dalam sambutannya ia mengatakan bahwa saat ini bangsa Indonesia masih harus berjuang menaklukkan ancaman dan tantangan yang nyata. Antara lain pemanasan global yang memicu beragam bencana alam serta kelangkaan pangan, energi dan air bersih.

Sebagai suatu bangsa diharapkan masyarakat selalu siap menghadapi bencana alam termasuk pandemi Covid-19 serta kelangkaan sumber daya dan harus senantiasa diperjuangkan secara bersama dengan kesungguhan.

“Kita mempunyai semua modal dasar untuk menjadi bangsa pemenang,” ujar Man Arfa

Untuk mengenang jasa para pahlawa, hendaknya masyarakat berupaya memanfaatkan energi baru dan terbaharukan dengan melakukan pengembangan sumber pangan berbasis potensi dan kearifan lokal.

“Ini sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pangan dan memperkuat keragaman pangan,” tandasnya.

KPU Bombana Sosialisasi Jelang Pendaftaran PPK dan PPS

Bombana, SultraNET. | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sosialisasikan isu-isu strategis menjelang rekrutmen Badan Ad Hoc Pemilu 2024.

Badan Ad Hoc yang bakal segera direkrut yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Sosialisasi dikemas dalam kegiatan Anak Muda Ngopi (Ngobrol Pemilu) bertempat di salah satu kedai kopi di Ibu Kota Bombana, Rabu (9/11/2022).

Peserta kegiatan ini didominasi Mahasiswa Politeknik Bombana (Polina) yang diperkirakan berjumlah lebih seratus orang.

Komisioner KPU Bombana, Abdi Mahatma mengatakan Pendaftaran Badan Ad Hoc KPU di Pemilu 2024, baik itu PPK maupun PPS, berbeda dengan Pemilu sebelumnya.

Jika sebelumnya dilakukan secara manual, namun pada Pemilu 2024 pendaftarannya akan dilakukan secara online melalui sistem teknologi informasi yang berbasis web yaitu Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc atau disingkat SIAKBA.

“Untuk pendaftaran, Pelamar tidak perlu tenteng-tenteng berkas ke KPU,” ujar Abdi Mahatma

Adapun persyaratan secara umum untuk menjadi Badan Ad Hoc Pemilu 2024 diantaranya adalah warga negara Indonesia, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, adil. tidak menjadi anggota partai politik, berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS.

Selanjutnya mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Pendidikan paling rendah SMA.

“Sebelum mendaftar menjadi PPK atau PPS Pemilu 2024, agar dipastikan tidak menjadi pengurus partai politik,” jelas Mantan Jurnalis itu.

Ia menambahkan untuk melakukan pengecekan data apakah terdaftar di Partai Politik dapat dilakukan melalui halaman web. www.infopemilu.kpu.go.id.

“Aduan juga dapat dilakukan melalui Help Desk KPU Bombana,” tandasnya. (IS)

Bawaslu Bombana Dorong Pengawasan Pemilu Partisipatif

Bombana, SultraNET. | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong terciptanya Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilu 2024 mendatang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bombana, Hasdin Nampo, Rabu (9/11/2022) mengatakan pengawasan partisipatif merupakan kegiatan yang dilakukan sukarela oleh individu atau lembaga dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilu berjalan demokratis.

Ia menjelaskan alasan kenapa diharapkan terwujudnya pengawasan partisipatif antara lain terbatasnya kemampuan dan kapasitas lembaga Pengawas Pemilu, Luas Wilayah, Kompleksitas Pemilu dan pelanggaran yang semakin beragam serta secara kualitatif untuk memastikan proses Pemilu berjalan demokratis.

“Di Bawaslu personil kita terbatas, sehingga keterlibatan masyarakat dan lembaga secara partisipatif sangat dibutuhkan,” ujar Hasdin Nampo saat menjadi pembicara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif.

Pengawasan Partisipatif merupakan wadah kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan masyarakat dalam meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan.

Ia merinci fungsi pengawasan yang ada di Bawaslu adalah proses Mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pencegahan merupakan tindakan, langkah-langkah upaya mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil pemilu.

Fungsi lain yaitu Penindakan merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengujian dan atau pemberian rekomendasi.

“Untuk mewujudkan pengawasan Partisipatif sosialisasi akan dilakukan dari tingkat Desa, Kecamatan hingga ke tingkat Desa.” Pungkasnya.

Pewarta : Idris hayang

Puting Beliung Porak-Porandakan Rumah Warga Desa Lora

Bombana, SultraNET. | Angin puting beliung disertai hujan lebat di Desa Lora, Kecamatan Mataoleo, Kabupaten Bombana, Minggu (6/11/2022) menyebabkan empat rumah dan satu buah kapal milik warga rusak parah, kerugian warga ditaksir puluhan juta rupiah.

Kepala Desa Lora, Herman Saputra mengatakan peralihan musim antara musim timur ke musim barat seperti saat ini adalah momok yang menakutkan bagi nelayan dan warga yang ada di Desa Lora, bagaimana tidak angin kencang, angin puting beliung dan ombak besar sering kali melanda Desa ini.

“Akibat angin puting beliung kemarin beberapa rumah warga rusak, disamping itu ombak besar juga telah menggulung beberapa perahu milik warga, untungnya hanya satu yang mengalami kerusakan karena yang lain cepat di evakuasi oleh warga,” ujar Herman Saputra, Senin (7/11/2022).

Untuk meringankan beban warganya yang terkena musibah angin puting beliung, Herman berharap Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dapat menyalurkan bantuan kepada para korban agar mereka dapat

kembali memperbaiki rumah mereka yang rusak.

<https://www.sultranet.com/wp-content/uploads/2022/11/Angin-Puting-Beliung-di-Desa-Lora.mp4>

“Kedepan kita berharap Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat dapat menganggarkan pembuatan talud penahan ombak, kasian warga ketika musim ombak harus selalu menjadi korban,” tandasnya.

(IS)

Uang Hasil Curi Motor di Bombana Digunakan Beli Chip Domino dan Sabu

Bombana, SultraNET. | Tim Opsnal Polres Bombana (Tim Singa) berhasil menangkap Pencuri Motor yang telah melancarkan aksi pencurian di beberapa tempat dalam wilayah hukum Polres Bombana, Minggu (6/11/2022), berdasarkan pemeriksaan sementara terhadap pelaku yang bernama Agung, uang hasil penjualan kendaraan hasil curian ia gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan chip permainan slot *higgs domino*.

Kasat Reskrim Polres Bombana, AKP. Muh. Sultan, SH mengatakan penangkapan pelaku pencurian motor bermula pada hari sabtu tanggal 6 november 2022 sekitar pukul 16.30 wita, pihaknya mendapat informasi dari masyarakat bahwa motor yang beberapa waktu lalu dilaporkan hilang terlihat melintas disekitar Desa Muleno, Kecamatan Poleang Tengah.

Tim Singa Polres Bombana kemudian berangkat dari Polres Bombana menuju Kecamatan Poleang untuk melakukan pengungkapan Kasus Pencurian Motor (Curanmor) yang terjadi di Kecamatan Rarowatu beberapa waktu lalu.

Sekitar pukul 18.30 wita, Tim Opsnal bertemu dengan masyarakat yang diduga memakai velg motor yang telah dicuri di Kecamatan Rarowatu dan dari hasil keterangan ia mengatakan bahwa diperoleh dari pelaku pencurian motor atas nama Agung.

Tim Singa kemudian melakukan pengepungan di tempat persembunyian pelaku dan setelah meyakini pelaku berada di dalam rumah, kemudian Tim masuk ke dalam rumah dan berhasil menangkap Pelaku.

“Pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan dompet dan kartu identitas para korban pemilik motor atau kendaraannya yang dicuri oleh pelaku,” ujar AKP. Muh. Sultan, SH



KBO Reskrim Polres Bombana, IPDA Prasetyo Nento, S.H (Berdiri) saat melakukan Pemeriksaan Terhadap Pelaku

Berdasarkan hasil interogasi Tim Opsnal Polres Bombana, pelaku telah melakukan pencurian motor di wilayah Kecamatan Rarowatu sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna silver hitam dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam.

Barang bukti 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna silver hitam diamankan di Kecamatan Poleang Tengah dari Anto sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha mio M3 warna merah hitam diamankan di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada

Kabupaten Kolaka dari Andi Syamsul Rijal keduanya merupakan tempat pelaku menjual motor tersebut.

Pelaku menjual motor hasil curian kepada Anto dengan harga 3.500.000 rupiah dan kepada Andi Syamsul Rijal dengan harga 2.500.000 rupiah, pelaku juga mengaku pernah menjual 1 unit sepeda motor Mio Soul GT tanpa dilengkapi dokumen.

“Uang hasil penjualan motor curian pelaku gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu dan chip untuk melakukan permainan game domino,” beber Mantan Kasat Intelkam Polres Bombana itu.

Polres Bombana telah mengamankan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna silver hitam, 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam, 1 (satu) unit Yamaha Aerox warna hitam tanpa kap dan 1 (satu) unit motor Yamaha Mio Soul.

“Kepada masyarakat yang merasa kehilangan kendaraannya agar menghubungi penyidik Polres Bombana,” tandasnya.

Atas perbuatannya pelaku telah di proses dan diterapkan pasal 363 ayat (1) ke-3 e Subs pasal 362 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara.

Pewarta : Idris Hayang

Executive Meeting di Jakarta, Pemkab Bombana Dinilai Pemborosan Anggaran

Bombana, SultraNET. | Kegiatan *executive meeting* yang bakal dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana di Provinsi DKI Jakarta yang memilih Hotel Borobudur sebagai tempat pelaksanaan pada Senin 7 November 2022 mendatang dinilai tidak substansi dan merupakan pemborosan anggaran daerah.

Berdasarkan undangan yang beredar, pelaksanaan Executive meeting dilakukan bertujuan dalam rangka upaya peningkatan kinerja pengelolaan usaha Pertambangan, industri dan perkebunan dalam program pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Disamping itu juga sebagai upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dan terkolaborasi dalam mewujudkan Bombana sebagai “Surga Investasi”.

Ketua LSM-PRIBUMI Ansar Achmad mempertanyakan urgensi Pelaksanaan Executive meeting sehingga harus dilaksanakan di Jakarta yang berkorekuensi menguras anggaran daerah untuk biaya tempat pelaksanaan serta biaya Aparatur Sipil Negara untuk menghadirinya.

Terlebih jika merujuk pada undangan Nomor 005/2330/2022 yang ditandatangani Pejabat Bupati Bombana H. Burhanuddin, para undangan yang bakal hadir merupakan Pimpinan Perusahaan yang sudah berinvestasi di Bombana sehingga pelaksanaan seharusnya bisa di lakukan di Bombana.

“Urgensinya apa sehingga pelaksanaannya harus di Jakarta, toh yang hadir sudah perusahaan yang beroperasi di Bombana bukan perusahaan yang baru diundang untuk masuk berinvestasi,” ujar Ansar Achmad, Rabu (2/11/2022).

Seharusnya lanjut Ansar Achmad, Pemerintah Kabupaten Bombana cukup mengundang dan menghadirkan para Pimpinan perusahaan tersebut di Bombana bukan sebaliknya.

“Ini menunjukkan ketidak berdayaan Pemerintah Kabupaten menghadirkan para investor itu ke Bombana,” ungkapnya.

Disamping itu dari undangan yang beredar ia menilai terdapat beberapa kejanggalan dalam lampiran undangan yang bakal hadir yang tidak mengundang Dinas Kesehatan dan Dinas Nakertrans yang merupakan instrumen penting dalam investasi yang sehat.

“Apa lebih Penting itu Ketua PKK dan Individu-individu yang di Undang dari pada Dinas Kesehatan dan Nakertrans untuk berbicara Surga Investasi,” sindirnya.

Ia menyebut Jika berbicara investasi maka seharusnya hal penting yang perlu diperhatikan adalah komitmen terhadap tenaga kerja lokal dan bagaimana

memastikan mereka memiliki jaminan sosial dan kesehatan.

“Dari undangan saja sudah nampak ketidak pedulian Pemerintah Kabupaten Bombana terhadap nasib pekerja lokal, sehingga ini perlu dipertanyakan apakah Bombana ini hanya surga untuk Investor atau bagaimana.” tegasnya.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Bombana dapat melakukan evaluasi terhadap rencana *executive meeting* yang pelaksanaannya di Jakarta agar dilakukan di Bombana saja.

“Anggaran kegiatan itu bisa di alokasikan untuk pembangunan infrastruktur Bombana yang masih banyak membutuhkan pembenahan,” tandasnya.

Dikonfirmasi terpisah PJ. Bupati Bombana H. Burhanuddin menjelaskan tujuan pelaksanaan Executive meeting di Jakarta adalah untuk memastikan Pimpinan perusahaan yang sedang berinvestasi di Bombana agar dapat hadir secara langsung.

“Karena biasanya jika kegiatannya dilakukan di Bombana paling yang datang yang mewakili bukan pimpinan utamanya,” ujar H. Burhanuddin

Ia menyebut pilihan Pemkab mendatangi langsung di Jakarta agar Pimpinan Perusahaan dapat mendengar langsung potensi dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bombana.

“Kita perlu berdiskusi langsung dengan pimpinan perusahaan yang dapat mengambil keputusan untuk membicarakan komitmen perusahaan terhadap masyarakat Bombana,” Tandasnya.

Adapun perusahaan yang mendapat undangan untuk hadir di Jakarta yaitu PT. Jhonlin Batu Mandiri, PT. Swakarya Sumber Makmur, PT. Cakra Bombana Sejahtera, PT. Prima Alam Gemilang, PT. Dua Samudra Perkasa, PT. Panca Logam Makmur.

PT. Tiran Indonesia, PT. Anugerah Internasional Industri, PT. Sahamu Mineral Abadi Perkasa, PT. Artha Mining Industry, PT. Bishi Industry Group, PT. Central Nickel Industry, PT. Sulawesi Steel Industry, PT. Gunung Andalan Sukses, PT. Almrhig

PT. Margo Karya Mandiri, PT. Tambang Bumi Sulawesi, PT. Bakti Bumi Sulawesi,

PT. Tekonindo, PT. Anugerah Harisma Barakah, PT. Timah Investasi Mineral, PT. Argabudi Baramulia Mandiri, PT. Rohul Energi Indonesia, PT. Tonia Mitra Sejahtera, PT. Narayana Lambale Selaras, PT. Bukit Makmur Resources, PT. Trias Jaya Agung, PT. Kasmar Poleang Raya dan PT. Tiar Mamuju Perkasa

Pewartar : Idris Hayang

TNI Manunggal, DPPKB Bombana dan BKKBN Sultra Lakukan Pelayanan KB Gratis

Rumbia, SultraNET. - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama mitra kerja terkait melaksanakan pelayanan KB gratis dalam rangka pelaksanaan TNI Manunggal-Keluarga Berencana-Kesehatan (TMKK) bertempat di Puskesmas Kecamatan se-Kabupaten Bombana.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bombana Drs. H. Abdul Azis, M.Si mengatakan, TMKK merupakan bentuk kemitraan antara TNI dan BKKBN yang bertujuan untuk meningkatkan capaian kesertaan KB sehingga dapat menaikkan kesejahteraan masyarakat.

“TNI sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di daerah dan di lapangan,” ujar Abdul Azis, Selasa (1/11/2022).

Mantan Kepala Dinas Pencatatan Sipil Bombana itu menjelaskan, TMKK merupakan salah satu bentuk sinergi antara pemerintah dan TNI dalam upaya memberikan kontribusi terkait dengan masalah kependudukan, dimana pemerintah daerah juga memperoleh mandat untuk turut berperan dalam mensukseskan agenda prioritas yang termasuk dalam Nawacita, salah satunya

adalah cita yang ke lima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

“Melalui pelayanan KB dan kesehatan, sosialisasi pendewasaan usia perkawinan, sosialisasi kesehatan reproduksi, sosialisasi perencanaan keluarga pada anak remaja, serta promosi program KB dengan dua anak lebih sehat,” bebernya

Kegiatan ini dilakukan serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, selama tanggal 1 Agustus sampai 30 September 2022. dan bertujuan untuk meningkatkan kesertaan ber-KB di wilayah kerja dan menjaga keberlangsungan pemakaian kontrasepsi.

“Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama saling bahu membahu demi terselenggaranya acara ini. Semoga, acara ini selalu memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bombana,” tutupnya.

Sebagai informasi, pelaksanaan TNI Manunggal - Keluarga Berencana - Kesehatan (TMKK) Untuk keseluruhan target 2.081 akseptor dan capaiannya 5.334 akseptor atau 256% dengan rincian IUD 160, MOP 3, MOW 8, Implan 300, Suntik 1.310, Kondom 42 dan Pil 1.455. Untuk pelayanan KB gratis kali ini, dilakukan untuk semua jenis pelayanan KB Umum termasuk vasektomi atau KB untuk pria. (adv)

KPU Bombana Segera Buka Pendaftaran PPK dan PPS

Bombana, SultraNET.| Tak sampai tiga pekan lagi, KPU Bombana bakal membuka pendaftaran dan merekrut badan adhoc penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Komisioner KPU Bombana, Abdi Mahatma, Selasa (1/11/2022) mengatan lebih dari 500 orang, terdiri dari 110 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 429 untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS). Mereka akan bekerja membantu KPU melaksanakan tahapan Pemilu 2024 di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

“Secara resmi, tanggal pasti pembukaan pendaftaran dan tahapan seleksi PPK/PPS belum keluar jadwalnya. Tapi kemungkinan besar akan dimulai pekan ketiga November 2022 untuk PPK, dan awal Desember untuk PPS,” ungkap

Ia menjelaskan, pendaftaran nanti tidak lagi offline atau ke Kantor KPU namun melalui aplikasi SIAKBA alias Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc.

Untuk itu, Komisioner yang membidangi Divisi SDM ini mengimbau agar mereka yang berminat menjadi penyelenggara adhoc, baik PPK maupun PPS, menyiapkan akun email sebagai satu-satunya akses untuk masuk ke SIAKBA.

“Jadi, tidak ada lagi datang ke Kantor KPU bawa berkas. Semua daftar lewat online dan unggah berkas pendaftaran anda disana. Pengumuman yang lulus berkas kami sampaikan di aplikasi itu, termasuk yang ke tahap berikutnya,” jelas Abdi.

Pria yang sebelumnya berprofesi sebagai jurnalis ini menambahkan kebutuhan akan badan adhoc adalah lima orang tiap Kecamatan dan di tiap Desa/Kelurahan dibutuhkan tiga orang PPS. Khusus di Bombana, jumlah Kecamatan adalah 22 dan Desa/Kelurahan adalah 143.

Sedangkan kebutuhan staf sekretariat PPK sejumlah tiga orang dan PPS juga tiga orang. Bedanya, staf berasal dari aparat pemerintah dan aparat desa. Mereka juga tak perlu daftar di SIAKBA tapi atas SK Bupati dan SK Kades/Lurah.

Terkait SIAKBA, Abdi menjelaskan, ketika sudah masuk di aplikasi ini, maka setiap pendaftar akan berhadapan dengan fitur-fitur yang mudah. Tinggal mengisi mau melamar posisi apa, di Kecamatan atau Desa apa, isi biodata lengkap termasuk mengisi riwayat hidup, surat pernyataan dan surat pendaftaran hingga menyiapkan berkas untuk diunggah di situs tersebut.

“Siapkan KTP, ijazah pendidikan terakhir yang minimal SMA, foto 4×6 termasuk jika ada sertifikat penyelenggara sebelumnya,” bebernya

Ada nilai tambah bagi mereka yang menguasai teknologi informasi. Semuanya diunggah dan tunggu notifikasi di emailmu, apakah berkasmu diterima atau masih ada yang harus diperbaiki. Komunikasi hanya dibolehkan lewat SIAKBA, antara pendaftar dan operator.

Sementara untuk tahapan seleksi, apakah menggunakan tes tertulis atau CAT,

sejauh ini belum ada petunjuk dan regulasi resminya. Saat ini, KPU Kabupaten/Kota yang hendak merekrut dan membuka pendaftaran PPK/PPS masih menunggu PKPU terkait Adhoc dan juknisnya diterbitkan KPU RI dalam waktu yang tak akan lama lagi. Sembari menunggu jadwal resmi keluar.

Abdi berharap agar para calon pendaftar menyiapkan diri dengan belajar tentang Pemilu baik itu UU Pemilu nomor 17 Tahun 2017 maupun UU Pilkada Tahun 2016 karena pertanyaan tim seleksi tidak akan keluar dari hal-hal tersebut.(*)